

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH



RLPPD 2023

KABUPATEN BINTAN



#*Bintan*
Bangkit

MAKNA LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN SLOGAN KABUPATEN BINTAN



1. Makna Lambang Daerah Kabupaten Bintan

Lingkar tali bersimpul lima berwarna coklat kekuning - kuningan melambangkan Kesatuan Bangsa Berdasarkan Pancasila.

- **Kolek berwarna kuning emas dan layar putih**, mengandung arti penghidupan dan darah pelaut penduduk Kabupaten Bintan.
- **Gelombang tiga lapis berwarna putih**, melambangkan geografis Kabupaten Bintan.
- **Cerana berwarna kuning kemerah-merahan**, melukiskan adat-istiadat dan keramah-tamahan penduduknya.
- **Huruf Arab "Alif" dan "Ya" berwarna hitam**, melambangkan Bahasa Melayu Riau sumber utama Bahasa Indonesia.
- **Mayang kelapa berwarna hijau kekuning-kuningan**, mengandung arti sumber kehidupan dan harapan dimasa depan.

2. MOTTO Kabupaten Bintan

"LAYAR TERKEMBANG"

memiliki arti ataupun singkatan pe**L**ayanan Mas**Y**arakat untuk **TER**capainya **KEM**ajuan dan pem**BANG**unan.

3. SLOGAN Kabupaten Bintan

Selendang berwarna kuning emas bertulis : **"Tak Berganjak Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing"** mengandung makna kebesaran jiwa, kemuliaan dan semangat yang tak tergoyahkan serta semangat kebersamaan untuk membangun.





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bintan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan atas partisipasi serta kolaborasi aktif dari tim penyusun dan seluruh perangkat daerah.

Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 72 Undang-Undang ini mengamanatkan, Bupati Bintan sebagai Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023. Hal ini juga sesuai dengan amanat Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Kepala daerah berkewajiban menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat, mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

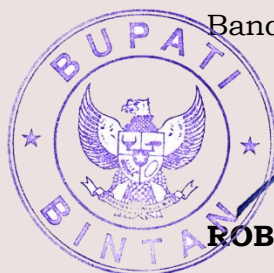
Pemulihan ekonomi kerakyatan dan reformasi struktural merupakan agenda penting penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 secara nasional dan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan. Kami menyadari sepenuhnya segala keterbatasan dan kemampuan dalam pelaksanaan kinerja daerah, selain itu juga masih terdapat beberapa tantangan pencapaiannya. Melalui penyampaian RLPPD Tahun 2023 diharapkan Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bintan.

Selanjutnya, izinkan saya mengucapkan terimakasih kepada semua yang terlibat didalam proses penyusunan RLPPD Kabupaten Bintan Tahun 2023. Seluruh hasil kinerja ini merupakan wujud kerjasama antara eksekutif, legislatif daerah serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan Bintan Rumah Kita yang Gemilang.

Demikian RLPPD Kabupaten Bintan tahun 2023 ini kami sampaikan, Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan perlindungan, melimpahkan rahmat serta meridhoi kerja keras kita semua.

Terimakasih

Bandar Seri Bentan, 25 Maret 2024



BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K



RINGKASAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BINTAN

TAHUN 2023

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO DAERAH

Capaian kinerja makro merupakan ukuran didalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.

Adapun perkembangan capaian kinerja makro daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan (%)
		Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,8	77,5	0,91%
2	Angka Kemiskinan	6,44	5,9	18,39%
3	Angka Pengangguran	6,91	5,43	-21,42%
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,44	6,14	38,29%
5	Pendapatan Per Kapita	140597,08 ribu	151204,60 ribu	7,54%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,29	0,27	-6,90%

Sumber: Badan Pusat Statistik Bintan, Tahun 2023

a. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Bintan pada tahun 2023 meningkat menjadi 77,5 tumbuh 0,7 poin dari sebelumnya 76,8 di tahun 2022. Perkembangan positif ini terus dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Bintan menjaga selama lebih dari 10 (Sepuluh) tahun berturut-turut berdasarkan pertumbuhan capaian IPM.

Pencapaian pembangunan manusia ini dilakukan dengan strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang-bidang kesehatan, pendidikan dan

ekonomi sesuai dengan agenda “sejahtera” dan didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan di masyarakat dengan mengutamakan sumber daya manusia berdaya saing serta berkeadilan.

Hasil lainnya berkenaan dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari aspek Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. IPM Kabupaten Bintan dilakukan dengan upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Adapun potret pembangunan manusia menunjukkan hasil positif sepanjang satu dekade melalui IPM pada tahun 2023 meningkat menjadi 77,50 Poin berstatus “tinggi” Melampaui Capaian Nasional 74,39, ini didukung dari peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) 74,82 Tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,44 Tahun, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 8,92 Tahun serta Pengeluaran Perkapita lebih dari Rp.14,82 Juta meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hasil diatas kemudian menempatkan IPM Kabupaten Bintan berada pada posisi ketiga teratas dari tujuh Kabupaten/Kota.

b. Angka Kemiskinan

Tahun 2023 Angka Kemiskinan di Kabupaten Bintan sebesar 5,9 % dalam menekan lonjakan persentase penduduk miskin diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Terobosan menekan laju penduduk yang terdampak agar tidak masuk ke dalam kemiskinan ekstrem adalah dengan usaha pemulihan melalui beragam kebijakan maupun bantuan sosial serta asistensi ekonomi kerakyatan kepada masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meringankan beban rumah tangga dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan serta peningkatan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan dan pendampingan bagi keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

c. Angka Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mengalami perkembangan positif dibandingkan posisi tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2023 yang menurun menjadi 5,43% dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 6,91 %. Inovasi daerah Pentalogi-Lokmed dan digitalisasi pelayanan SiLancar mampu mendorong serapan tenaga kerja lokal dengan bekerjasama dengan 17 Perusahaan di Kawasan Industri.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah ditinjau dari sisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan menunjukkan perkembangan dengan Bangkit (*Rebound*) ditengah kondisi gejolak ekonomi regional dan nasional. Laju Pertumbuhan Ekonomi tersebut ditunjukkan dengan mampu tumbuh hingga 6,14 % pada tahun 2023 dari sebelumnya di tahun 2022 juga bangkit mencapai 1,7 %.

e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Perkapita berguna untuk melihat rata-rata pendapatan masyarakat dari suatu wilayah serta dapat berfungsi untuk mengetahui perkembangan pembangunan. Pada tahun 2023 Pendapatan Perkapita

Kabupaten Bintan meningkat 7,54 % menjadi Rp.151.204,60. Jumlah tersebut tumbuh dari tahun sebelumnya Rp.140.597,08. Normalisasi pemulihan pasca covid-19 didukung dengan pemerintah mendorong kembali sepenuhnya sector-sektor usaha terbuka 100 % yang bersinggungan dengan potensi pendapatan asli masyarakat daerah di Kabupaten Bintan.

f. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Pada dasarnya Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Potret gini ratio Kinerja pemerintah kabupaten Bintan menekan laju pertumbuhan kesenjangan pendapatan ditengah pemulihan situasi pasca pandemic covid-19 ini sebesar 0,02. Dengan demikian, jika pada tahun 2022 tingkat ketimpangan pendapatandi Kabupaten Bintan sebesar 0,29 dan pada tahun 2023 turun menjadi 0,27, itu menunjukkan adanya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Dalam konteks ini, penurunan nilai Gini menandakan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Bintan menjadi lebih merata antara tahun 2022 dan 2023.

II. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja LPPD 2023
1.	Pendidikan 4 Indikator	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	96,51%
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,62%
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,67%
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	22,41%
2.	Kesehatan 14 Indikator	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,51
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	91,17%
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	88,62%
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	92,08%
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,65%
		12	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,23%

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja LPPD 2023
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	85,61%
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,35%
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 Indikator	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	23,29%
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	25,15%
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	91,03%
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84,50%
		24	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100%
		25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	72,43%
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	94,44%
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5 Indikator	28	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1,11%
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,74%
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	16,35%
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja LPPD 2023
	Perlindungan Masyarakat 7 Indikator	35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,75 menit
6.	Sosial 2 Indikator	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%

III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk Kabupaten Bintan atas laporan tahun 2022 memiliki skor 3,2662 diperingkat 62 dari 416 Kabupaten se-Indonesia dan untuk di Kabupaten Se Kepulauan Riau kabupaten Bintan memiliki skor tertinggi. Hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bintan tersebut menempatkan daerah ini meraih penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terbaik pada tahun 2023.
- Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kabupaten Bintan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun anggaran 2022 didapatkan hasil opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".
- Selama 12 Tahun berturut-turut Kabupaten Bintan mampu mempertahankan prestasi tersebut, Capaian opini WTP merupakan bukti komitmen dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik meskipun dihadapkan pada kondisi luar biasa dalam masa pemulihan ekonomi daerah pasca Pandemi Covid-19.

IV. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

- Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.125.932.190.819,32
- 74,84% Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2023 ditopang oleh Pendapatan Transfer (dana Perimbangan).

- Komponen PAD menyumbang porsi 25,16% dari total pendapatan daerah sekaligus.
- Secara umum adapun gambaran perkembangan daripada kondisi realisasi Belanja daerah Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. Rp 1.130.223.625.116,21,- atau 88,57% dari perencanaan awal belanja daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.276.050.118.943,00,-.
- Adapun untuk Anggaran Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp 1.034.750.367.550,00 dan terealisasi sebesar Rp 923.296.549.974,72 atau 89,23%.
- Sedangkan untuk realisasi belanja modal TA 2023 sebesar Rp 98.394.859.215,49 atau 87,04% dari anggaran sebesar Rp. 113.041.619.004,00
- Selanjutnya, untuk realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp 1.227.737.655,00 atau 9,15% dari anggaran sebesar Rp. 13.419.634.489,00.
- Untuk Belanja Transfer di Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2023 terdapat anggaran sebesar Rp 114.838.497.900,00 dengan realisasi mencapai Rp. 107.304.478.271,00 atau sebesar 93.44%.

V. REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI BELANJA MENURUT JENIS PENGELUARAN, DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

a. Pendapatan Daerah

Stabilitas pendapatan daerah Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2023 dari sisi optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah menjadi tolak ukur kemandirian daerah ditengah arus dampak pandemi serta konstelasi kebijakan pemerintah pusat berkenaan pembatasan pergerakan masyarakat dan eskalasi global pada sektor-sektor pendukung potensial pendapatan daerah Kabupaten Bintan.

Pada Kebijakan Umum Anggaran tahun 2023 Kabupaten Bintan untuk target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp.1.112.601.950.412,00,- dan untuk realisasi sebesar Rp. 1.125.932.190.819,32,- atau 101,20 %.

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	PENDAPATAN	1.112.601.950.412,00	1.125.932.190.819,32
1.1	Pendapatan Asli Daerah	270.242.744.593,00	279.759.209.266,32
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	216.980.052.000,00	222.785.314.669,39
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	10.998.264.000,00	10.168.513.627,00
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.203.564.693,00	9.203.642.205,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	33.060.863.900,00	37.601.738.764,93
1.2	Pendapatan Transfer	709.995.622.469,00	700.163.682.992,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	100.078.193.813,00	94.081.827.540,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	492.782.445.746,00	492.782.445.746,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	28.192.247.000,00	26.740.078.812,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	88.942.735.910,00	86.559.330.894,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	57.564.896.000,00	57.564.896.000,00
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	19.710.229.000,00	19.710.229.000,00
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus	-	-
1.2.2.3	Dana Keistimewaan	-	-
1.2.2.4	Dana Desa	31.699.703.000,00	31.699.703.000,00
1.2.2.5	Insentif Fiskal	6.154.964.000,00	6.154.964.000,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	838.545.965.764,00	842.657.689.620,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	70.985.447.295,00	84.929.110.628,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	-	-
1.3	Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah	3.813.240.055,00	3.515.291.933,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	3.813.240.055,00	3.515.291.933,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Unaudited)

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kinerja capaian realisasi belanja daerah kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	BELANJA DAERAH	1.276.050.118.943,00	1.130.223.625.116,21
1.1	BELANJA OPERASI	1.034.750.367.550,00	923.296.549.974,72
1.1.1	Belanja Pegawai	547.603.796.286,00	475.624.106.241,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	430.061.411.293,00	392.246.138.403,72
1.1.4	Belanja Subsidi	1.157.000.000,00	1.156.960.000,00
1.1.5	Belanja Hibah	48.031.959.971,00	46.969.820.050,00
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.896.200.000,00	7.299.525.280,00
1.2	BELANJA MODAL	113.041.619.004,00	98.394.859.215,49

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1.2.1	Belanja Modal Tanah	4.600.000.000,00	99.257.509,00
1.2.1	Belanja Peralatan dan Bangunan	23.414.770.221,00	22.148.074.801,00
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.252.698.061,00	27.385.016.612,00
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.875.027.657,00	45.891.317.110,49
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.899.123.065,00	2.871.193.183,00
1.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-
1.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.419.634.489,00	1.227.737.655,00
1.3.1	Belanja Tidak Terduga	13.419.634.489,00	1.227.737.655,00
1.4	BELANJA TRANSFER	114.838.497.900,00	107.304.478.271,00
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	23.373.960.600,00	17.499.862.991,00
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	91.464.537.300,00	89.804.615.280,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Unaudited)

Pada tahun anggaran 2023 realisasi dari setiap komposisi pembentuk belanja daerah adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi Rp. 1.130.223.625.116,21,- yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial. Selanjutnya adalah Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 98.394.859.215,49,- yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta, Belanja Modal Aset Lainnya. Komponen Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp. 1.227.737.655,00 Transfer di tahun anggaran 2023 terealisasi. Adapun komponen Belanja Transfer yang terealisasi di tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 107.304.478.271,00,- .

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana

cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	163.448.168.531,00	163.448.168.531,26
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	163.448.168.531,00	163.448.168.531,26
1.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.250.000,00
1.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
1.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		163.448.168.531	163.448.168.531
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0	154.257.379.747

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Unaudited)

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 kemudian berdasarkan realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 sebesar Rp. 163.448.168.531,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp. 163.448.168.531,00.

Sedangkan untuk realisasi Penggunaan SILPA APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 163.448.168.531,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp. 163.448.168.531,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 0. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang merupakan pengeluaran yang penggunaannya antara lain untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Tidak terdapat Realisasi pengeluaran pembiayaan APBD Tahun 2023.

VI. INOVASI DAERAH

Kabupaten Bintan memastikan daerah berkinerja dengan baik, setelah melewati pemulihan dari Covid-19. Kabupaten Bintan kemudian mendapatkan anugerah Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten Bintan untuk kategori daerah perbatasan terinovatif se-Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian pada puncak IGA 2023. Selain penghargaan melalui apresiasi Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan mendapatkan juga dana insentif daerah untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 sebagai stimulant percepatan dan pengembangan inovasi.

Penghargaan prestisius lainnya diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan adanya inovasi pelayanan publik "Kampung Kerupuk" sebagai sebagai Top 45

Inovasi Nasional dari 1917 proposal yang masuk pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2023 sekaligus menerima Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023 diserahkan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Ini mengukuhkan kepemimpinan Bupati Bintan selama 2 tahun begitu piawai secara berturut-turut mengawinkan gelar inovasi IGA Award-Kemendagri dan Top 45 Inovasi Nasional-Kemenpan RB.

Selanjutnya, dengan didukung oleh sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik, akuntabilitas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan semakin baik terutama dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kondisi yang tersebut, maka pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bintan kembali mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari BPK RI. Keberhasilan Opini WTP 12 tahun berturut-turut bagi Kabupaten Bintan Opini WTP ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.